

ANALISIS KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018

NOVIA NURMAYANTI

Univesitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

nurmayantinoviall@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten/Kota dari tahun 2013-2018. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, variabel independen adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, Upah Minimum kabupaten, dan Jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan metode data panel, yaitu gabungan dari time series, berupa runtutan waktu dari tahun 2013-2018 dan data cross section yaitu berupa urutan lintang 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah total observasi sebanyak 162 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan variabel pengangguran, upa minimum, serta jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Kemiskinan, IPM, Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten, Jumlah Penduduk.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah social yang selalu menjadi pembicaraan khusus diberbagai Negara terutama di Negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan yang berkelanjutan akan berakibat pada suatu masalah yang kompleks. Contohnya, kemiskinan dapat berpengaruh dengan masalah kesehatan, penddikan, kriminalitas dan masih banyak lagi.

Istilah kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak dapat mencapai standar hidup tertentu. Menurut Badan Pusat Statistika (2010), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk mencapai kebutuhan . ada beberapa jenis kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan structural terjadi karena struktur yang membuat sebagian masyarakat tertentu yang mendominasi sarana ekonomi, social, politik dan budaya (Lubis, 1986). Sedangkan kemisknkan cultural disebabkan oleh kebiasaan atau sikap masyarakat dengan perilaku hidup yang

boros, kurangnya keterampilan kerja, dan tidak memiliki tabungan, erta memiliki sikap tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

Di Indonesia tingkat kemiskinan tidaklah sedikit yang disebabkan oleh perilaku hidup masyarakatnya sendiri, sehngga hal ini menyebabkan yingkat penduduk miskin setiap tahunnya meningkat. Di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinnannya tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), masalah kemiskinan di Indonesia terletak pada pulau Jawa, terutama di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan selama ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu dan tidak merata ke semua masyarakat.

Secara umum dilihat dari tahun 2013 sampai 2018 persentase penduduk miskin di pulau jawa mengalami penurunan disetiap tahunnya. Rata-rata penduduk miskin tertinggi terdapat di provinsi DI Yogyakarta sebesar 13,50 persen, dan penduduk miskin terendah terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar 3,75 persen. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 8,85 persen, yang merupakan penduduk miskin terbesar keempat di Pulau Jawa setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut BPS rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.176,40 ribu jiwa dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 8,90 persen.

Upaya penanggulangan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui lima kebijakan yaitu: Pertama pengangguran kemiskinan dapat dilakukan secara sistemik, serentak dan bersinergi banyak pihak dengan dukungan lintas pemerintah. Kedua perlunya upaya pendampingan kepada masyarakat miskin dalam memberikan pemahaman untuk lepas dari kemiskinan. Ketiga perlunya kesepakatan dari kepala OPD/Biro (Organisasi Perangkat Daerah) harus berorientasi pada pengangguran kemiskinan. Keempat pengangguran kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pendampingan kemandirian, pengembangan usaha produktif mandiri, serta program lain CSR/TJSL (Coporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dengan kemitraan bersama masyarakat. Kelima Jawa Barat sebagai alat kendali penanggulangan kemiskinan berbasis individu dengan data spasial dan a-spasial, untuk mempermudah pencarian data perindividu (Bapeda Jabar, 2014).

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi stnadar hidup secara ekonomi masyarat disuatu daerah. Fenomena ini biasa terjadi karena rendahnya pendapatan mansyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, serta rendahnya kalitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya penghasilan akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi stnadar hidup seperti standar kesehatan dan pendidikan. Masalah kemiskinan sangat sering terjadi di beberapa Negara yang sedang berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi

ketidak meratanya kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat.

Penduduk miskin tidak hanya hidup dengan kekurangan uang atau tingkat pendapatan yang rendah, melainkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, mendapatkan perlakuan ketidakadilan dalam hukum dan rentan terhadap timbulnya ancaman tidak kriminal (Suryati, 2005).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut United Nasional Development Program (2004) indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia diantaranya: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi), dan memiliki standart hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli dan penghasilan).

Pengangguran

Pengangguran merupakan individu yang berada pada umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Upah Minimum

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003) upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penduduk

Lembaga BPS Statistik Indonesia (2013) dalam (Irharni, 2017) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.

METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan pengaruh IPM (X1), pengangguran (X2), upah minimum (X3) dan jumlah penduduk (X4) sebagai variabel independen terhadap kemiskinan (Y) sebagai variabel dependen.

Penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan yang diambil dari beberapa instansi terkait. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel yaitu penggabungan dari deret berkala (*time series*)

dari tahun 2013-2018 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 27 data mewakili Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang memiliki tiga metode estimasi, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* menggambarkan penggabungan metode *Cross Section Weight* (EGLS). Sedangkan *Random Effect* menggunakan penggunaan metode *Generalized Least Square* (GLS). Maka bentuk estimasi dari perhitungan regresi data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y	= Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 (ribu jiwa)
i	= Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat
t	= Waktu atau Tahun (2013-2018)
X_1	= Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistik Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan persen)
X_2	= Pengangguran Terbuka penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan persen)
X_3	= Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan oleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (rupiah)
X_4	= Penduduk adalah yang ditentukan oleh pemerintah disetiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (dalam satuan jiwa)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
ε_{it}	= Variabel Pengganggu (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan pembahasan variabel-variabel yang telah diuji. Berikut pembahasan dari uji yang telah dilakukan :

1. **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1) terhadap Kemiskinan (Y)**
 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t-hitung -6.728 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.65 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) maka tolak H_0 . Artinya, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5% terhadap kemiskinan.
2. **Pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y)**
 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t-hitung 0.047 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.65 ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$) maka tolak H_1 . Artinya, pengangguran tidak berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5% terhadap kemiskinan.
3. **Pengaruh Upah Minimum (X3) terhadap Kemiskinan (Y)**
 Dari hasil menunjukkan bahwa t-hitung 3.023 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.65 ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) maka tolak H_0 . Artinya, upah minimum berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5% terhadap kemiskinan. Akan tetapi, hipotesis pada pengangguran menyatakan negatif jadi dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. **Pengaruh Jumlah Penduduk (X4) terhadap Kemiskinan (Y)**
 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa t-hitung -0.896 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.65 ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$) maka tolak H_0 . Artinya, upah minimum berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5% terhadap kemiskinan.
5. **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan**
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis diperoleh F-hitung sebesar 466.2793 $>$ F-tabel 1.54. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Barat yang diukur menggunakan R^2 adalah sebesar 0.990722. Hal ini bahwa variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99.07% dan sisanya yaitu sebesar 0.93% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

KESIMPULAN

Dalam hasil analisis pengaruh dari variabel yang meliputi indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis pertama dapat diterima atau terbukti.
2. Pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis kedua tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

3. Upah Minimum berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis ketiga tidak dapat diterima atau tidak terbukti.
4. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka hipotesis keempat tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat*. Diambil 25 juli 2019, dari <https://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat. 2010-2015*. Diambil 25 juli 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2017). *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2013-2018*. Diambil 25 juli 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2013-2018*. Diambil 25 juli 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2016). *Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat*. Diambil 25 juli 2019, dari <https://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2018). *Kemiskinan kabupaten/kota di jawa barat 2013-2018*. Diambil 25 juli 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. (2015). *Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota. 2005-2013*. Diambil 10 Agustus 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. *Jawa Barat Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Jawa Barat*. Diambil 25 juli 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistika. *Upah Minimum Kabupaten/Kota Berbagai Tahun, Jawa Barat*. Diambil 10 Agustus 2019, dari <https://mantanburuh.wordpress.com>
- Badan Pusat Statistika. *Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2010-2020*. Diambil 6 Oktober 2019, dari <http://www.jabar.bps.go.id>
- Bhowi Dewananda. (2018). *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015*.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar – dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga
- Irawan dan Suparmoko, 2002. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE : Yogyakarta.
- Kristanto, P. D. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*.

- Okta Ryan Pranata. P. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*.
- Puspita, Dita Wahyuni. (2015). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Economics and Policy. Vol 8.No. 1. Hal.100-107
- Putri Aprilia, D., & Subroto Tjipto, W. (2016). Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2003-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–8.
- Putri dan Nyi Nyoman. (2013). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.2 No.10 Hal 441-448
- Sadono,S (1994). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saharuddin. D dan Fauzi. F. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak*. Vol.6 No.1 Hal. 100-114
- Septiani, N. (2017). *Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015*.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. (2003).
- Zuhdiyaty, Noor. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)*. Jurnal JIBEKA.Vol 11. No. Hal 27-31

